

Judul : Mendag Curiga Ada Penyelewengan
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Mendag Curiga Ada Penyelewengan

Minyak goreng hasil DMO diklaim sudah melebihi kebutuhan.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
RIZKIYAN ADIYUDHA

JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut pasokan minyak goreng di tengah masyarakat seharusnya melimpah. Pasalnya, ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng yang terkumpul dalam kebijakan *domestic market obligation* (DMO) sudah cukup besar.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, total pasokan minyak sawit hasil DMO periode 14 Februari-8 Maret mencapai 573,8 ribu ton. Adapun yang tersalurkan sebanyak 415,7 ribu ton dalam bentuk minyak goreng. Jumlah itu, kata Lutfi, telah melebihi perkiraan kebutuhan satu bulan yang mencapai 327,3 ribu ton.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin berandai-andai mengenai penyebab masih sulitnya pasokan minyak goreng, terutama yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Namun, dugaan bahwa minyak sawit DMO bocor ke industri besar atau justru diekspor ke luar negeri tetap ada.

"Kalau kita lihat, ini merembes ke industri yang mereka tidak berhak dapat minyak DMO atau tindakan melawan hukum dengan mengeks-

por tanpa izin. Tapi, ini bagian yang kita selidiki," kata Lutfi dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/3).

Kebijakan DMO mewajibkan para eksportir CPO, RBD olein, dan *used cooked oil* mengalokasikan 20 persen pasokannya untuk pasar dalam negeri dari total yang akan diekspor.

Selain itu, pasokan tersebut dipatok harganya dengan kebijakan *domestic price obligation* (DPO), yakni sebesar Rp 9.300 per kg untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein.

Lewat DMO dan DPO, harga minyak goreng diharapkan dapat ditekan sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp 11.500 per liter untuk curah, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan Rp 14 ribu per liter untuk kemasan premium.

Para eksportir yang belum memenuhi kebijakan DMO dan DPO tidak akan mendapatkan izin untuk ekspor CPO. "Kita tahu di mana lokasi tangki (pabrik) jalur distribusi D2 (distribusi tingkat dua), alamat, semua sudah kita berikan ke Mabes Polri untuk di-kroscek," ujarnya menjelaskan.

Lutfi menegaskan, kebijakan DMO, DPO, ataupun HET minyak goreng adalah kebijakan jangka panjang. Oleh karena itu, Kemendag tidak akan mencabut kebijakan itu.

Jika aturan Kemendag tidak dipatuhi, pelaku akan berlawanan dengan aparat hukum.

"Kita kedepankan asas praduga tak bersalah karena kita tidak mau berspekulasi. Jadi, kita serahkan ke penyidik pegawai negeri sipil Kemendag dan juga Satgas Pangan di kepolisian," katanya.

Lutfi mengatakan, Kemendag bahkan bakal menaikkan volume DMO minyak sawit (CPO) dari 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan itu untuk menjamin tersedianya kebutuhan bahan baku produksi minyak goreng.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono enggan berkomentar banyak ihwal dugaan Mendag yang menyebut ada kebocoran CPO hasil DMO.

"Harus ada bukti dulu bahwa benar-benar bocor," katanya kepada *Republika*, kemarin.

Adapun terkait rencana Kemendag menaikkan volume DMO, Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi mengatakan, Gapki akan mendukung kebijakan tersebut.

Pasokan minyak goreng hingga saat ini masih bermasalah. Masyarakat di berbagai daerah masih kesulitan mendapatkan minyak goreng di toko ritel maupun pasar tradisional.

Satgas Pangan Polri sejak beberapa waktu lalu telah turun tangan menyelidiki dugaan penimbunan di gudang-gudang distributor. Namun, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika menyatakan belum menemukan tindak pidana praktik

REALISASI ATURAN DMO

(per 14 Februari-8 Maret 2022)



kartel maupun penimbunan.

Kelangkaan minyak goreng juga mendapatkan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengaku siap turun tangan guna membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi KPK.

"Saya tawarkan dalam waktu dekat ini mungkin kita perlu bahas tata niaga bahan pokok, termasuk hortikultura dan bahan impor lainnya," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (8/3). ■ ed: satria kartika yudha

Baca juga
di republika.id
Pindai QR Code ini

